

## MENELISIK STRATEGI KELEMBAGAAN DESA DALAM PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI PERTANIAN DI KAWASAN TERTINGGAL

Subhan Purwadinata\*

Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Email: [123adinata@gmail.com](mailto:123adinata@gmail.com)

---

### ABSTRAK

*Paper ini membahas tentang peran kelembagaan desa dalam pengelolaan dana desa untuk pengembangan agroindustri pertanian di kabupaten Sumbawa sebagai kawasan tertinggal di Indonesia. Bukti empiris menerangkan bahwa masih banyak masalah desa seperti memahami kebutuhan sektor pertanian menjadi kegiatan produktif di desa, masalah penurunan peran kelembagaan desa yang secara konsisten mengembangkan potensi pertanian menjadi bernilai tambah ke sektor agroindustri. Regulasi otonomi daerah di Indonesia memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan menjalankan pemerintahannya termasuk desa sebagai unit terkecil dalam mendukung pembangunan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif eksploratif dengan menyingkap peran lembaga desa dalam pengelolaan dana untuk pengembangan potensi pertanian sebagai kawasan agribisnis pertanian desa yang strategis untuk dapat dikembangkan sebagai modal dalam memacu pertumbuhan ekonomi pedesaan. Analisis yang digunakan menggunakan analisis SWOT kemudian melakukan reduksi data, display data dan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa desa memiliki keterbatasan dalam regulasi atas pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan dana desa, perlu penataan struktur lembaga ekonomi desa khususnya alokasi dana desa pada kawasan pedesaan yang menjadi pusat bisnis dan teknologi untuk mendukung agroindustri. Perlu pembinaan secara teknis baik manajemen dan keuangan bagi lembaga agroindustri. Melakukan penataan lembaga keuangan agar mempermudah akses modal oleh petani. Program penguatan lembaga pertanian, pelatihan pengelolaan dan manajemen kelompok tani. Pembinaan secara rutin lembaga pertanian. Membentuk lembaga perdagangan ditingkat petani. Membentuk forum komunikasi antar petani dengan pengusaha yang difasilitasi oleh badan usaha milik desa. Mengembangkan kemitraan antar petani dengan lembaga keuangan desa. Program penguatan kelembagaan desa tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sehingga kelembagaan desa sebagai sebuah strategi terhadap pengembangan agroindustri desa diperlukan.*

**Kata Kunci** – Kelembagaan Desa, Dana Desa, Agroindustri Kawasan Tertinggal

---

Tanggal Diterima: April 2019

Tanggal Publikasi: Juni 2019

---

### I. PENDAHULUAN

Dalam beberapa penelitian menegaskan bahwa kelembagaan sektor informal di negara sedang belum berbasis masyarakat dan interaksi masyarakat mempengaruhi pergeseran kelembagaan, serta model yang tidak lengkap di tingkat pusat berdampak buruk ke tingkat yang lebih rendah termasuk kelemahan strategi manajemen program yang berkembang menjadi konflik kelembagaan [1]. Struktur

kelembagaan yang tidak tepat, strategi dan potensi stakeholder mempengaruhi pengembangan model kelembagaan, termasuk keterkaitan antara berbagai pemangku kepentingan yang peduli pada pembangunan terutama di pedesaan [2].

Dalam konteks kelembagaan desa bahwa pembangunan sosial dan ekonomi pedesaan tetap memprioritaskan pada produktivitas dan kualitas hidup petani dan menjadi perhatian terbesar pemerintah di

negara berkembang, terutama kelembagaan desa yang berbasis pertanian dalam menghasilkan produktivitas pertanian yang lebih tinggi [3]. Dalam upaya itu perlu pertimbangan iklim yang akan mempercepat urbanisasi dan langsung mengurangi ketergantungan pada rumah tangga petani pedesaan [4]. Walaupun demikian juga tidak melupakan bahwa industri pertanian di Indonesia berkontribusi terhadap pemanasan global [5]. Hal tersebut diperkuat sebuah penelitian bahwa namun dalam aktivitasnya pertimbangan emisi industri juga tidak dapat diabaikan [6]. Dalam pengaturan kelembagaan menegaskan bahwa banyak transaksi yang memakan waktu dan menghambat pembangunan pedesaan [7]. Dalam konsep itu petani secara mandiri menanggapi perubahan kontraktual dari waktu ke waktu terhadap keputusan partisipasinya [8].

Terlalu sering dalam proses partisipatif, petani dianggap hanya sebagai sumber informasi dalam pilihan transformasi wilayah pedesaan, misalnya kebutuhan yang membawa lebih banyak akses terbuka di bawah pengelolaan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan petani [9]. Prinsip ini telah dipresentasikan melalui keterlibatan efektif para pemangku kepentingan pertanian [10]. Penggunaan dana desa untuk pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus peningkatan kapasitas kelompok masyarakat petani. Jika ditinjau dari segi kelembagaan desa masih sangat minim lembaga desa yang berperan dalam pengelolaan dana desa terutama dana yang diperuntukkan bagi pengembangan agroindustri pertanian di desa melalui wadah usaha milik desa.

Kabupaten Sumbawa sebagai kawasan 3T (Terjauh, Terluar dan Tertinggal) di Indonesia memiliki kelembagaan desa dengan berisikan beberapa orang saja yang

diakomodir dalam Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Lembaga tersebut belum sepenuhnya berperan aktif dalam melibatkan masyarakat desa untuk ikut memberikan partisipasi optimal dalam mengubah paradigma berpikir masyarakat dari pertanian tradisional menuju pertanian modern dengan mengembangkan produksi pertanian ke dalam agroindustri. Oleh karena itu penelitian ini menjadi penting untuk menelusuri strategi kelembagaan desa yang tepat dalam pengembangan produksi pertanian menjadi agroindustri pertanian yang bernilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan petani di desa sebagai prioritas dalam pemanfaatan dana desa.

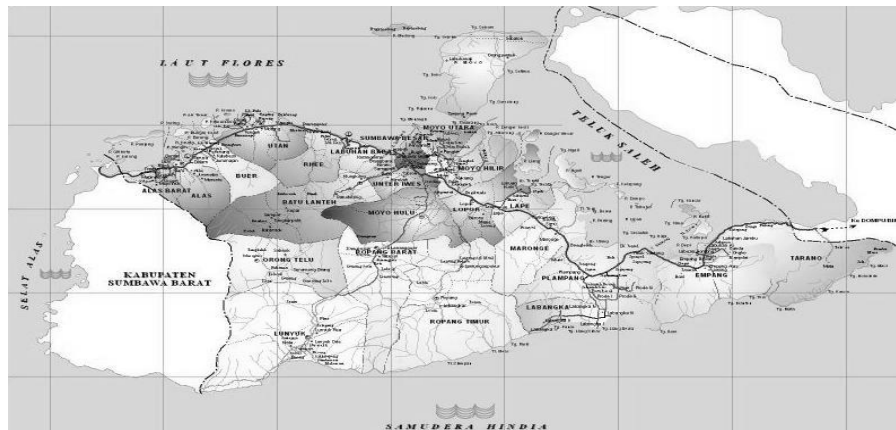
## II. METODE PELAKSANAAN

### A. *Case study setting: Sumbawa Regency as a Disadvantaged Area in Indonesia*

Lokasi studi ini dilakukan di kawasan timur Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat- Indonesia yang meliputi kecamatan Lape-Lopok, Kecamatan Maronge, Kecamatan Plampang, Kecamatan Empang, dan Kecamatan Tarano. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan banyaknya potensi-potensi yang dimiliki pada kawasan tersebut seperti pertanian tanaman pangan dalam rangka mempercepat pertumbuhan pedesaan.

Objek dari studi ini adalah perilaku (*behaviour*) petani sesuai dengan modal sosial sebagai pilar dalam membangun strategi kelembagaan. Populasi yang digunakan dalam studi ini adalah seluruh masyarakat yang ada di lokasi penelitian seperti para penentu kebijakan (pemerintah) mulai di tingkat desa yang bermata pencaharian sebagai petani. Purposive sampling dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri khusus yang dimiliki informan. Sebagai identitas berikut peta wilayah pengembangan agroindustri

pedesaan di kawasan timur kabupaten Sumbawa:



Gambar 1. Pulau Sumbawa dan Wilayah Agroindustri di Daerah Tertinggal di Indonesia

## B. Pengumpulan dan analisis data

Pengumpulan data dengan wawancara dan dianalisis dengan analisis kualitatif seperti data sumber daya alam, potensi pertanian (prospek komoditi pertanian meliputi luas sawah, komposisi penggunaan lahan, panjang irigasi, luas sawah dengan irigasi, ketersediaan prasarana pertanian) dan aglomerasi ekonomi pedesaan (konsentrasi kegiatan ekonomi dari pola penyebaran industri dan perdagangan) yang dikonversikan dalam sebuah analisis strategi pengembangan agroindustri dalam menelusuri kondisi empiris pengelolaan dana desa dalam pengembangan agroindustri pada wilayah kawasan agroindustri Kabupaten Sumbawa meliputi 6 kecamatan di wilayah timur kabupaten Sumbawa yaitu kecamatan lopok, Lape, Maronge, Plampang, Empang dan Tarano.

Metode analisa data dalam studi ini dilakukan dengan menggunakan tehnik analisis kualitatif menggunakan tehnik analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*) adalah metode untuk melihat (*scanning*) posisi kelembagaan desa di tengah lingkungan yang mempengaruhinya. Metode ini melihat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas

sebuah kelembagaan yang berasal dari dua sumber, yaitu dari dalam (*internal*) dan dari luar (*eksternal*) kelembagaan desa. Strategi SO digunakan untuk mengoptimalkan kekuatan desa yang dimiliki untuk merebut peluang sebesar-besarnya. Strategi ST digunakan untuk mengoptimalkan kekuatan desa yang dimiliki dalam rangka mengatasi ancaman. Strategi WO diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang desa yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada dan Strategi WT didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensive dengan berusaha meminimalkan kelemahan desa yang dimiliki untuk mengatasi ancaman.

## III. HASIL DAN DISKUSI

### A. Strategi Pengembangan Kawasan Agroindustri di Kabupaten Sumbawa

Strategi pengembangan kawasan timur agroindustri di Kabupaten Sumbawa menggunakan prinsip-prinsip dan nilai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang berdasarkan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Untuk mempermudah dalam perencanaan pengembangan kelembagaan desa maka harus dilihat dari sisi strategi pengembangan

sumber daya yang meliputi strategi buatan/ekonomi (teknologi dan permodalan), pengembangan kelembagaan berdasarkan sumber daya manusia dan sumberdaya sumberdaya alam/lingkungan, sumberdaya hubungan antar kelembagaan.

**Tabel 1. Matrik SWOT Strategi Pembangunan Sumberdaya Kelembagaan**

		Strengths (S)	Weaknesses (w)
		Lingkungan Internal	1. Lembaga sosial masyarakat cukup banyak (LSM, Pendidikan, dan Kelompok tani). 2. lembaga ekonomi (koperasi, keuangan dan industri ) cukup banyak.
Lingkungan Eksternal			
Oppurtunites (O)	SO	WO	
1. Kerjasama pemerintah antar wilayah, propinsi dan pusat sangat di mungkinkan. 2. Komitmen lembaga nasional untuk sosial, kesehatan dan budaya berpeluang dalam membantu pengembangan kawasan. 3. Dukungan lembaga internasional (funding) 4. Kerasama antar pemerintah dan swasta serta masyarakat. 5. pembangunan yang lebih partisipatif.	1. memanfaatkan secara maksimal seluruh program kerjasama antar seluruh tingkatan pemerintah. 2. mmaksimilakn peran LSM pemberdayaan dan perguruan tinggi sebagai bentuk pembangunan partisipatif. 3. optmalisasi lembaga ekonomi non pertanian dalam menjalin kerjasama modal, pemasaran dan produksi. 4. memanfaatkan kerja sama antara produsen dengan investor.	1. Meningkatkan korrordinasi antar lembaga pemerintah (desa sampai pusat). 2. mendorong terbentuknya dan memanfaatkan lembaga pertanian sebagai pelaku dalam menjalin kemitraan dengan pelaku ekonomi. 3. meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi terutama di wilayah empang, plampang dan Lopok.	
Threats (T)	ST	WT	
1. Otonomi daerah mendorong pemerintah untuk membuat peraturan daerah dalam mendukung	1. Melibatkan partisipatif masyarakat, LSM dalam membuat rencana pelaksanaan kawasan agroindustri	1. Pembentukan lembaga pertanian unyuk mempermuda koordinasi, meaaui perda atau ketentuan lain.	

keuangan dan percepatan pembangunan desa.	2. membuat aturan lembaga ekonomi aktif dalam pembangunan di wilayah agroindustri.	2. pningatatan kemampuan lembaga ekonomi non pertanian.
---	--	---

**B. Strategi Kelembagaan Pengembangan Sumberdaya buatan dalam pengembangan agroindustri**

**Tabel 2. Matrik SWOT Strategi Pengembangan Sumberdaya Buatan**

<b>Lingkungan Internal</b>	<b>Strengths (S)</b>	<b>Weaknesses (w)</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah prasarana social, pendidikan kesehatan dan dan peribadatan banyak.</li> <li>sarana dan parsarana ekonomi lembaga keuangan, listrik, komunikasi dan perhubungan jumlahnya cukup banyak dan berada di seluruh kecamatan di wllayah agrobapet.</li> <li>Industri pertanian, peterakan dan perikanan tdak kesulitan bahan baku.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>dilihat dari kebutuhan, maka sarana social,pedidikan dan ksehatan masih kurang.</li> <li>pasar hewan belum ada</li> <li>sarana dan prasarana ekonomi masih terbatas (kapasitas dan kuantitas).</li> <li>kapasaitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengairan terbatas.</li> </ol>
<b>Lingkungan Eksternal</b>	<b>SO</b>	<b>WO</b>
<b>Oppurtunites (o)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>optimalisasi pemanfaatan tekhnologi tepat guna.</li> <li>pembangunan sarana ekonomi non pertanian untuk mendukung investasi.</li> <li>penerapan teknologi baru.</li> <li>pengembangan saran telekomunkasi dan saran social lainnya.</li> <li>Pemanfataan sarana ekonomi secara maksimal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana ekonomi.</li> <li>pembangunan sarana pasar hewan/ternak</li> <li>penyediaan alat pertanian, perikanan dan peternakan yang modern.</li> <li>pembangunan dan peningkatan jumlah dan kapasitas sarana pengairan.</li> </ol>
<b>Threats (T)</b>	<b>ST</b>	<b>WT</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengusaha dan masyarkat setepat harus membangun iklim investasi yang baik.</li> <li>penghapusan subsidi bagi masyaratak terutama subsidi bidang pertanian,perikanan dan peternakan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>membangun agrondustri yang hemat BBM.</li> <li>Penerapan tehnologi pertanian,peternakan dan perikanan sesuai dengan kemampuan keuangan dan SDM.</li> <li>Pembangunan lembaga ekonomi dan sosial untuk menarik investor.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh sarana dan prasarana yang telah ada agar dimanfaatkan secara efisien.</li> <li>menyediakan sarana pertanian, peternakan dan perikanan yang efisien dan ekonomis.</li> </ol>

Strategi kelembagaan dari pembangunan dan pemanfaatan secara pengembangan sumber daya buatan yaitu optimal seluruh sarana san prasarana sosial

dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana telekomunikasi, perhubungan untuk menjamin sirkulasi barang dan jasa, sehingga kegiatan ekonomi berjalan dengan lancar karena membangun infrastruktur pedesaan sesuai penelitian di negara-negara berkembang tetap merupakan tantangan finansial, kebijakan dan teknologi yang signifikan [11]. Pemerintah, pengusaha dan masyarakat harus mampu membangun dan memanfaatkan secara optimal sarana dan

prasarana industri, perdagangan dan keuangan sebagai sumber modal dan pasar produk. Penyediaan sarana industri, agribisnis sesuai dengan teknologi untuk menjamin kelangsungan produk. Efisiensi penggunaan air dan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pengairan serta pemeliharaan sumber air juga menjadi penting untuk diregulasi dalam kelembagaan.

**C. Strategi Kelembagaan Pengembangan Sumberdaya alam dalam pengembangan agroindustri**

**Tabel 3. Matrik SWOT Strategi Pengembangan Sumberdaya Alam Berkelanjutan Berbasis Masyarakat**

<b>Lingkungan Internal</b>	<b>Strengths (S)</b>	<b>Weaknesses (w)</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RTRW kabupaten sudah tersusun</li> <li>2. Potensi lahan pertanian, kelautan dan peternakan sangat luas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana tata ruang spesifik bagi pemanfaatan lahan, pembagian kawasan dan pemanfaatan laut/perikanan belum ada.</li> <li>2. Produktifitas lahan pertanian dan kelautan masih rendah</li> <li>3. Jumlah Hari hujan dan curah hujan rendah.</li> </ol>
<b>Lingkungan Eksternal</b>		
<b>Oppurtunites (o)</b>	<b>SO</b>	<b>WO</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU no 32 membuka peluang pemda untuk membangun daerahnya sendiri</li> <li>2. Permintaan pasar produk pertanian,perikanan, peternakan dan bahan olahan diminati di pasaran local dan regional.</li> <li>3. banyak invstrosr melkukan investsai dibidang pertanan, peternakan dan perikanan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dilakukan sesuai dengan rentcana tata ruang.</li> <li>2. Pemanfaatan potensi lahan pertanian, peternakan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan pasar dan pendapatan daerah.</li> <li>3. pemeliharaan dan pemanfaatan potensi sumber daya air secara maksimal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana tata ruang bagi kawasan agrobapet (Industri, perdagangan dan produk pertnian).</li> <li>2. Mendorong optimalisasi perda lar serta menentukan tempat pengembalaan untuk setiap kabupaten.</li> <li>3. Status kepemilikan tanah dijamin dan terarah.</li> </ol>
<b>Threats (T)</b>	<b>ST</b>	<b>WT</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Krisis ekonomi nasional</li> <li>2. Globalisasi menuntut persaingan antar produk pertanian, peternakan, dan perikanan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan, produksi baik untuk perikanan, pertanian, peternakan dan olahan hasil harus diperhitng secara efinis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan air secara efisien.</li> <li>2. meningkatkan produktifitas dan kualitas produksi pertanian, peternakan yang di sesuai dengan perimintaan pasar.</li> </ol>

Strategi kelembagaan pedesaan dalam tata kelola dana desa diarahkan pada pengembangan sumber daya alam berkelanjutan yaitu optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian sehingga mampu menghasilkan produk yang mempunyai daya saing di tingkat pasar. Pengelolaan lahan pertanian dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fisik, kimia dan kegunaan lahan. Hal ini dilakukan agar tercapai pertanian yang berwawasan lingkungan atau pertanian yang berkelanjutan. Pemanfaatan lahan untuk kegiatan non farm dan of farm optimalisasi pemanfaatan air baik air tanah maupun air permukaan agar mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Strategi Kelembagaan dalam pengembangan sumber daya manusia yaitu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan, studi banding dan praktek lapangan. Hal ini dilakukan untuk semua sektor dan seluruh wilayah kawasan terutama di lokasi strategis (Empang, Plampang dan Lape). Peningkatan kreatifitas dan membuka akses koperasi modal pedesaan bagi perluasan hak kepemilikan lahan pertanian dan pola penggunaan lahan yang lebih efisien, karena menurut penelitian koperasi modal pedesaan dapat berfungsi sebagai agen perantara untuk mengurangi biaya transaksi yang terkait dengan pertukaran hak guna lahan dan tidak hanya mendorong kegiatan penyewaan/konsolidasi lahan tetapi juga memungkinkan masuknya entitas rumah tangga non pertanian ke dalam bisnis pertanian [12] dan koperasi modal pedesaan memiliki dampak yang lebih besar pada adopsi teknologi dari pada lembaga keuangan mikro pedesaan [13]. Serta adanya transformasi dari pedesaan tradisional menjadi pedesaan dengan aktivitas industri [14].

Masyarakat pedesaan di daerah tertinggal menghadapi sejumlah tantangan yang menarik dan spesifik dalam pembangunan ekonomi dan sosial terutama fokusnya pada pada peran lembaga, karena sangat penting bagi pembangunan pedesaan. Kondisi ini menurut penelitian sangat memperkuat konsep Ekonomi Kelembagaan Baru (NIE) yang menekankan pada struktur kelembagaan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi secara efisien di pedesaan dalam jangka panjang dan untuk menjelaskan fenomena historis pedesaan dalam kaitan dengan pertumbuhan ekonomi pedesaan [15]. Oleh karena itu sejalan dengan penelitian bahwa pilihan strategi adaptasi dipengaruhi oleh modal sosial dan akses terhadap kelembagaan melalui penelitian berbasis agroindustri pertanian diperlukan [16].

Kultur kelembagaan desa dalam pengembangan agroindustri di Indonesia, sejak disahkannya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, sesuai dengan program besar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah membawa perubahan yang signifikan terkait dengan reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan konsep membangun dari pinggiran desa menjadi subjek dan partisipasi aktif dengan mengeluarkan dana desa sebesar Rp.20,77 trilyun pada tahun 2015 dan berkembang menjadi Rp 46,9 Trilyun pada tahun 2016 untuk seluruh desa di Indonesia yang dimanfaatkan untuk pembangunan desa termasuk pengembangan agroindustri pedesaan [17].

Berdasarkan pengamatan di lapang pengelolaan dana desa dengan proporsi terbesar digunakan untuk kebutuhan dasar masyarakat desa, tetapi alokasi sisa kurang sejalan dengan kondisi tingkat kemajuan desa, sehingga kurang mampu mengurangi ketimpangan dan ketertinggalan utamanya bagi desa dengan status tertinggal/sangat

tertinggal. Temuan bahwa luas wilayah cukup berpengaruh pada nilai alokasi tapi perlu dikaji lebih mendalam apakah komponen ini patut menjadi unsur dengan bobot penting dalam alokasi dana desa. Luas wilayah perlu mempertimbangkan sebaran penduduk karena sejatinya pembangunan desa yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan lebih kepada pembangunan manusia. Penyaluran dana desa juga masih menunjukkan pada keterlambatan karena syarat-syarat penyaluran yang terlambat disampaikan.

Dengan mempertimbangkan empat sumber daya di atas maka strategi yang akan dalam pengembangan kawasan agroindustri yaitu pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan berbasis masyarakat, dengan tetap memperhatikan keunggulan komparatifnya sehingga pembangunan pertanian kawasan agroindustri data berwawasan lingkungan dan mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan pasar dalam daerah dan ekspor. pembangunan dan peningkatan kualitas dan kapasitas berbagai sarana dan prasarana serta permodalan untuk menghasilkan produk pertanian serta produk industri/olahan lainnya yang mempunyai daya saing di pasaran (lokal/regional). Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan melakukan upaya peningkatan keterampilan dan kemampuan menguasai teknologi tepat guna dan informasi sehingga tercipta pelaku usaha agribisnis yang profesional serta mampu memanfaatkan lahan menjadi produktif dan ekonomis dan pembangunan kemitraan antar seluruh stakeholder bagi pemerintah, swasta, dan masyarakat sehingga tercipta kondisi yang kondusif dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat lingkaran kawasan agroindustri.

Kajian ini menegaskan tentang kondisi alokasi dana desa yang dikembangkan secara maksimal untuk pengembangan

produk primer petani desa untuk menjadi produk yang bernilai tambah yang diaplikasikan atau disinergikan dengan perusahaan ritel profesional yang ada di desa padahal menurut penelitian bahwa hanya pertanian merupakan kegiatan produktif di daerah pedesaan, bahkan juga terjadi 'kekosongan kelembagaan' selama ini perlu diubah secara konsisten dan bertahap yang masih harus dilakukan di wilayah pedesaan terutama investasi produktif daripada hanya investasi sosial yang sesuai dengan masyarakat pedesaan [18].

Berdasarkan pada tabel matrik SWOT, strategi pengembangan kelembagaan desa, terutama dalam pengembangan pembangunan sumberdaya sosial/budaya dan manfaat sosial yang dibawa dari transformasi modern dan kegiatan budaya penduduk desa bermanfaat bagi pembangunan modernisasi pertanian dan pedesaan yang berkelanjutan [19]. Selanjutnya kelembagaan akan menumbuhkembangkan lembaga pertanian dan kelompok industri, serta pengusaha agar mempermudah melakukan koordinasi dan akses informasi, peningkatan peran lembaga pendidikan untuk memberikan kontribusi positif pada pengembangan kawasan agroindustri. Optimalisasi peran lembaga pemerintah agar pelayanan dan pelaksanaan kebijakan dapat dijalankan sesuai aturan, membangun kerjasama antar lembaga pertanian baik dalam wilayah kawasan maupun diluar kawasan dan melakukan penataan lembaga ekonomi non pertanian agar mampu berperan aktif membantu permodalan, pasar dan produksi.

#### **PENUTUP**

Berdasarkan proses evaluasi dengan menelusuri strategi yang tepat dalam pengembangan agroindustri ditinjau dari sisi kelembagaan desa dengan analisis matrik SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and*

*Threat*) ditemukan hasil bahwa dari sudut pandang internal dan eksternal kelembagaan desa perlu pembentukan pola dan perencanaan kawasan agroindustri di kabupaten Sumbawa sebagai kawasan tertinggal di kawasan 3T (Tertinggal, Terjauh dan Terluar) di wilayah timur Indonesia yang disinergikan dengan alokasi penggunaan dana desa. Kawasan agroindustri idealnya direncanakan program dan kegiatan secara terpadu dan berkelanjutan, untuk memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat pedesaan yang bersangkutan. Kesimpulannya, hasil penelitian ini memperluas cakupan penelitian yang telah ada sebelumnya mengenai konsep strategi kelembagaan desa dalam penggunaan dana desa bagi pengembangan agroindustri terutama di daerah tertinggal yaitu perlu adanya alokasi dalam perencanaan dan tata kelola dana desa melalui penguatan kelembagaan desa dalam bentuk pengembangan sumber daya alam, buatan dan pengembangan agroindustri yang berkelanjutan.

#### REFERENSI

- [1] Thu, T., Tran, H., Zeller, M., & Suhardiman, D. (2016). crossmark. *Ecosystem Services*, 22(October), 83–93.
- [2] Habtetsion, S., & Tsighe, Z. (2002). The energy sector in Eritrea — institutional and policy options for improving rural energy services, 30, 1107–1118.
- [3] Mwesigye, F., Matsumoto, T., & Otsuka, K. (2017). Land Use Policy Population pressure , rural-to-rural migration and evolution of land tenure institutions: The case of Uganda. *Land Use Policy*, 65, 1–14.
- [4] Nawrotzki, R. J., Hunter, L. M., Runfola, D. M., & Riosmena, F. (2015). Climate change as a migration driver from rural Climate change as a migration driver from rural and urban Mexico.
- [5] Karthika, I. N. (2010). Benefits of using biogas technology in rural area : karo district on supporting local action plan for greenhouse gas emission reduction of north sumatera province 2010 – 2020 Benefits of using biogas technology in rural area : karo district on supporting local action plan for greenhouse gas emission reduction of north sumatera province.
- [6] Singh, S., & Kulshrestha, U. C. (2014). Rural versus urban gaseous inorganic reactive nitrogen in the Indo-Gangetic plains ( IGP ) of India. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/9/12/125004>
- [7] Lai, Y., & Tang, B. (2016). Land Use Policy Institutional barriers to redevelopment of urban villages in China : A transaction cost perspective. *Land Use Policy*, 58, 482–490.
- [8] Murphy, G., Hynes, S., Murphy, E., & Donoghue, C. O. (2014). Land Use Policy An investigation into the type of farmer who chose to participate in Rural Environment Protection Scheme (REPS ) and the role of institutional change in influencing scheme effectiveness. *Land Use Policy*, 39, 199–210.
- [9] Beyene, A. D., & Koch, S. F. (2013). Forest Policy and Economics Property rights , institutions and choice of fuelwood source in rural Ethiopia. *Forest Policy and Economics*, 30, 30–38.
- [10] Elena, M., Ph, M., Engineering, A. A., D, D. G. P., Engineering, A. A., & Mancinelli, C. (2017). Land Use Policy European farmers and participatory rural appraisal: A systematic literature review on experiences to optimize rural development. *Land Use Policy*, 60, 1–11.
- [11] Ambrose, H., Gershenson, D., & Gershenson, A. (2014). Driving rural energy access : a second-life

- application for electric-vehicle batteries.  
<https://doi.org/10.1088/1748-9326/9/9/094004>
- [12] Ito, J., Bao, Z., & Ni, J. (2016). Land rental development via institutional innovation in rural Jiangsu ., *Food Policy*, 59, 1–11.
- [13] Abate, G. T., Rashid, S., Borzaga, C., & Getnet, K. (2016). Rural Finance and Agricultural Technology Adoption in Ethiopia: Does the Institutional Design of Lending Organizations Matter? *World Development*, 84, 235–253.
- [14] Pudianti, A., Alie, J., & Suprapti, A. (2016). Role of culture in rural transformation in Manding Village , Bantul Yogyakarta , Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 227(November 2015), 458–464.
- [15] Meador, J. E., & Skerratt, S. (2017). On a unified theory of development: New institutional economics & the charismatic leader. *Journal of Rural Studies*, 53, 144–155.
- [16] Brien, D. J. O. (2012). A new institutional approach to entrepreneurship and inequality in rural Russian villages: Survey findings from 1991 to 2006, *Journal of Eurasian Studies*, 3(1), 41–48.
- [17] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Negara Kesatuan Republik Indonesia Tentang Desa
- [18] Zezza, A., & Winters, P. (2009). Rural Income Generating Activities: Whatever Happened to the Institutional Vacuum? Evidence from Ghana, Guatemala, Nicaragua and Vietnam. *World Development*, 37(7), 1297–1306
- [19] Popa, C., & Tomescu, G. (2017). Comparative study on the optimization strategies of the human settlement environment of the rural settlements in Asia Comparative study on the optimization strategies of the human settlement environment of the rural settlements in.